

Enhancing the Role of Religious Education in Countering Violent Extremism in Indonesia – **CONVEY Indonesia**

# Policy Brief Series

Issue 10 | Vol. 1 | 2018

Policy Brief series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan oleh PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia, berkolaborasi langsung dengan tujuh lembaga riset.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme bernuansa kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset-survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

## Revitalisasi Program Deradikalisasi di Dalam Penjara: Mendorong Kerjasama Berbagai Stakeholder

Division for Applied Social Psychology Research (DASPR - Daya Makara)  
Universitas Indonesia

## Pesan-Pesan Utama

- Belum ada asesmen menyeluruh terhadap program-program yang diadakan untuk para narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia
- Belum adanya payung hukum negara untuk penanganan narapidana terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan
- Asesmen ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga negara yang berkepentingan.

## Mengapa Diperlukan Asesmen?

Asesmen program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas program-program tersebut bagi narapidana teroris. Tanpa melakukan evaluasi yang komprehensif, dapat diprediksi bahwa kegiatan-kegiatan serupa yang akan berjalan tidak memiliki panduan yang jelas dan berpotensi menambah resistensi para narapidana untuk berpartisipasi mereka dalam program-program serupa.

## Latar Belakang

Program deradikalisasi yang banyak dilakukan oleh lembaga baik pemerintah ataupun swasta dewasa ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sebaliknya, penyebaran paham radikal masih marak terjadi di kalangan masyarakat umum, tak terkecuali warga binaan lembaga pemasyarakatan. Menelaah situasi ini, sudah seharusnya semua pihak dapat bekerjasama merumuskan masalah untuk menemukan penyelesaian agar situasi ini tidak terus terjadi.

DASPR–Daya Makara UI bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia telah melakukan asesmen terhadap sejumlah program deradikalisasi yang dilakukan lembaga-lembaga pemasyarakatan. Melalui asesmen ini, temuan-temuan menarik hendak kami tampilkan dengan harapan menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan publik.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai proses

pengumpulan data. Kami mewawancarai orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam program deradikalisasi, baik itu lembaga pelaksana, petugas lapas, dan warga binaan yang pernah menjadi peserta program deradikalisasi. Melalui hasil wawancara dan FGD kami mendapatkan pandangan dan penilaian terkait dengan efektivitas dan keberhasilan program tersebut. Wawancara dan FGD kami lakukan di waktu dan tempat yang terpisah selama kurang lebih dua bulan, terhitung antara pertengahan Oktober dan akhir November 2017.

### • Responden Asesmen

Tiga kelompok sasaran dengan latar belakang berbeda menjadi responden asesmen kami:

- ✓ Empat lembaga yang pernah melakukan program deradikalisasi kepada narapidana dalam lapas, yaitu; Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Search for Common Ground (SFCG), United Nations Inter-regional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), dan Centre for Development Studies (CDS).
- ✓ Empat lembaga pemasyarakatan yang memiliki warga binaan kasus terorisme (narapidana) dan pernah bekerjasama dengan

lembaga lain untuk melakukan program deradikalisasi, yaitu; Lapas Cibinong, Lapas Pasir Putih, Lapas Cipinang, dan Lapas Kedungpane.

- ✓ Warga binaan masyarakat yang pernah mengikuti program deradikalisasi dan tinggal di salah satu lapas.

## Temuan

Temuan utama dari asesmen ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

Tidak terjadi koordinasi yang jelas antar lembaga-lembaga program deradikalisasi di lembaga masyarakat, baik lembaga pemerintah, LSM atau lembaga riset. Hal ini menjadi aspek yang sangat penting mengingat koordinasi dalam hal perencanaan, pendanaan, serta pengimplementasian program sangat merangkai sebuah cetak biru dalam penanganan narapidana teroris (napiter).

“Nggak usah yang diskusi, yang asesmen aja, profiling aja kan mereka udah paham, nomor 1 nomor 5 pasti nanya ini nih pak, pasti nanya ini, karena mereka udah berulang-ulang. Udah dikasih tau, jadi udah hapal duluan”

(Staf Lapas Cipinang).

Temuan lainnya, adalah tidak ada kejelasan berupa penetapan pemerintah mengenai pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab utama untuk pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga masyarakat. Ada dualisme dalam pemegang wewenang ini dalam kenyataannya di lapangan, antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Masyarakat (Dirjenpas). Hal ini sangat berpengaruh kepada jalur komunikasi penyelenggaraan program deradikalisasi dalam lembaga masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti LSM dan lembaga riset.

“Iya kalau untuk prosedur kan memang seharusnya kan semua kan melewati

Dirjenpas ya. Memang harus ada MoU dulu dengan Dirjenpas. Harus satu pintunya Dirjenpas. Tapi beberapa, ada sih kemarin---. Langsung sebut aja gak apa-apa. Dari PRIK ya. PRIK itu awal-awal pertama kali mereka kalau setiap datang ke sini pasti ada pendamping dari Dirjenpas”

(Staf Lapas Semarang)

Dalam bidang kapasitas dari petugas lembaga masyarakat, ditemukan tidak adanya keseragaman dalam hal petunjuk pelaksanaan serta kriteria individu para pamong untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing napiter. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan efektivitas pada program deradikalisasi di masing-masing lembaga masyarakat. Para pamong tidak dipilih berdasarkan kapasitas, melainkan penunjukan langsung dari Kepala Lembaga Masyarakat. Lebih lanjut, pamong juga tidak memiliki jenjang karir struktural yang jelas. Di sisi lain, pamong memiliki resiko mendapatkan ancaman dari pihak narapidana dan jaringannya, atau memiliki resiko terpapar dengan ajaran-ajaran radikal.

“Petugas yang disebut pamong itu belum masuk struktur, hanya ditunjuk aja sama Kalapas tanpa kriteria yang jelas. Struktur ga ada, insentif juga ga ada. Ga jelas deh, kasian sebenarnya.”

(Staf Ditjenpas)

Mengenai teknis kegiatan program deradikalisasi, diperlukan adanya penelusuran demografi narapidana terorisme di masing-masing lembaga masyarakat agar tepat sasaran. Efektivitas dan respon narapidana teroris terhadap program deradikalisasi berbeda-beda untuk setiap topik program deradikalisasi dibanding dengan topik lainnya. Selain itu, perpindahan narapidana teroris ke satu lembaga masyarakat lain, dengan minimnya koordinasi antar lembaga penyedia program, membuat narapidana tersebut tidak dimonitor dalam jangka panjang.

“Pembinaan itu sebetulnya baiknya itu diajak dialog. Diajak bersama perjuangkan, bukan hanya masalah ekonomi lah. Kan ekonomi itu satu dua yang masih membutuhkan. Tapi kalo kita-kita yang bener itu ngga hanya masalah ekonomi. Saya itu walaupun hidup nggak pernah kaya, istilah hidup kekurangan, tapi saya nggak pernah mikir masalah ekonomi. Yang penting itu pembinaan nanti arahnya *iso* buat pondok, umat Islam ini bisa baik gimana gitu. Lingkungan jadi islami gimana.”

(Napiter Lapas Cibinong)

Dalam hal menentukan topik yang menarik agar program dapat diikuti oleh para narapidana teroris menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa tema diskusi yang bersifat membenturkan ideologi cenderung membuat para narapidana teroris menolak berpartisipasi, atau berpartisipasi hanya untuk mendapatkan kemudahan remisi ataupun pembebasan bersyarat.

“Pertama keberlanjutannya itu loh ini apa setelah kegiatan. Karena biasanya kan teman-teman ini ngadakan kegiatan sebulan sekali, dua bulan sekali sedangkan kita berinteraksi dengan pemikiran ini bukan sehari dua hari. Gitu kan. Ya kan kita juga bukan sehari dua hari sering kita sudah lama kita bergelut dengan ini. Ingin kita sebenarnya teman-teman juga ingin, apa, teman diskusi dengan beda pemikiran kan sehingga apa yang kami pikir apa yang kami pahami sekarang ini bisa mungkin bisa lebih terbuka bisa ada koreksi dari teman-teman lain atau kami memberikan masukan kepada pihak-pihak lain apa yang kami pahami gitu sehingga saling menigisi kan. Kalau teman-teman kami sih sebenarnya kami terbuka aja kalau untuk diskusi sih insyaallah kami terbuka aja. Tapi, bukan untuk memaksakan kehendak. Memaksakan pemahaman, kita kalau

asas kita berdiskusi itu kan bukan saling, sudah membawa kebenaran dulu terus dipasang di sini. Harus ini yang kalian pahami, kan enggak, yang namanya diskusi Ya memang yang kita diskusi itu kan di kalangan ulama-ulama kita memang termasuk apa ya bukan sesuatu yang sudah *ushul*, Cuma masalah salah cabang aja sebenarnya.”

(Napiter Lapas Cipinang)

“Iya, jadi kalau mau diskusi ayo kita diskusi sering kita sampaikan kepada bapak-bapak BNPT yang mungkin punya lebih banyak fasilitas kan untuk menghadirkan acara seperti kalau diskusi ayo secara langsung, *live* lah, supaya yang lain juga tau kan, iya kan jangan tertutuplah. Sekarang yang namanya kebenaran apalagi yang menyangkut suatu agama Islam kan kami selama ini membawa nama agama Islam. Pengennya apa-apa yang kami lakukan pastinya kami usahakan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kami pahami kalau kami punya salah, oke hadirkan ulama-ulama lain dari organisasi lain gitu. Hadirkan berikan kami penerangan tapi sekali lagi jangan saling memaksa gitu kan. Saling maksa gitu. Namanya diskusi kan.”

(Napiter Lapas Cipinang).

Pendekatan yang dilakukan oleh salah satu partisipan program asesmen, yaitu Search for Common Ground (SFCG), memberikan paradigma baru pada program CVE dalam lembaga pasyarakatan yaitu: 1) Program inklusif tidak hanya diperuntukkan kepada narapidana teroris, serta 2) Mengangkat topik pelatihan yang tidak bersifat konfrontatif terhadap ideologi yang dimiliki para narapidana teroris. Berdasarkan hasil temuan ini, tim peneliti memutuskan untuk mendukung kegiatan *Conflict Management Training* dan *Life Management Training* yang dilakukan oleh Search for Common Ground di beberapa lembaga pasyarakatan di Indonesia, sebagai *best practice* untuk

program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan.

“Mungkin warga binaan juga yang tidak berani berinteraksi atau berbicara. Tapi, waktu ada acara dari Common Ground itu semua dibicarakan keinginannya setelah bebas atau keinginannya selama di dalam.”

(Napiter Lapas Cipinang)”

“Common Ground itu programnya CMT-LMT. Conflict Management Training ya. Management training. Itu juga mendapatkan kesan yang positif juga ya dari napiter di sini. Mereka bisa mengeksplor bentuk program itu. Bahkan mereka malah pingin modulnya. Pingin berbagi modul kan, pingin diaplikasikan di luar.” (Staf Lapas Semarang)

## Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian (asesmen) di atas, berikut ini adalah rekomendasi kebijakan, yang khususnya ditujukan kepada pemerintah (Kemenkumham dan BNPT):

### 1 Penyusunan Payung Hukum

Para pemangku kepentingan perlu membukukan payung hukum yang menegaskan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab utama dalam penanganan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan. Hal ini penting karena diharapkan dapat mampu mencegah miskoordinasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Payung hukum ini lebih lanjut juga mengatur jalur komunikasi antar lembaga pelaksana program serta garis besar silabus perencanaan pembinaan narapidana teroris. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) memegang peranan penting dalam isu ini, sehingga DASPR Daya Makara UI merekomendasikan Dirjenpas sebagai pemangku kepentingan utama bagi penanganan narapidana teroris

serta program-program deradikalisasi yang dilaksanakan baik secara internal maupun melibatkan lembaga lain.

### 2 Peningkatan Kapasitas Staf Lembaga Pemasyarakatan

Terdapat fakta bahwa terjadi ketimpangan dalam kapasitas para staf lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap narapidana teroris, serta ada kekhawatiran dari para staf lembaga pemasyarakatan atas keterpaparan terhadap ideologi-ideologi radikal. Hal ini membuat DASPR Daya Makara UI merekomendasikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari elemen pemerintah untuk menyusun dan mengimplementasikan program-program peningkatan kapasitas petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya membina napiter. Peningkatan kapasitas ini bisa berupa peningkatan pemahaman terhadap ajaran radikal dan bagaimana cara melawannya, atau peningkatan pengetahuan maupun kemampuan dalam pembinaan narapidana teroris di luar aspek-aspek ideologis. Selain peningkatan kapasitas, para staf lembaga pemasyarakatan yang menangani langsung napiter, yang biasa disebut pamong, diberikan status resmi dalam struktur kepegawaian lembaga pemasyarakatan sekaligus insentif terkait tanggung jawab dan wewenang tersebut.

### 3 Perbaikan Konten dan Format Program Deradikalisasi

Format dan topik-topik yang digulirkan dalam program-program deradikalisasi lembaga pemasyarakatan sangat beragam. Efektifitasnya juga beragam. DASPR Daya Makara UI merekomendasikan untuk diperbanyak program-program yang bersifat:

- Inklusif, melibatkan narapidana umum
- Sesuai dengan keadaan demografi narapidana teroris di masing-masing lembaga pemasyarakatan

- Tidak berupaya mempertentangkan ideologi-ideologi Islam
- Memiliki tujuan yang spesifik untuk pembinaan tingkah laku tertentu

Dari asesmen yang telah dilakukan, penting untuk dicatat bahwa pemerintah mendukung kegiatan *Conflict Management Training – Life Management*

*Training* (CMT-LMT) yang telah dirintis oleh Search for Common Ground, sebagai program yang layak untuk diteruskan dan dipertahankan dalam program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan hasil asesmen tim DASPR Daya Makara UI.



**Enhancing the Role of Religious Education in  
Countering Violent Extremism in Indonesia**

Gedung PPIM UIN Jakarta,  
Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) | Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



Empowered lives.  
Resilient nations.